



BARGAINING: REVISI TEORI PERIMBANGAN KEKUATAN DALAM HUBUNGAN DIPLOMASI INDONESIA, MALAYSIA, CINA DAN AMERIKA SERIKAT

Ian Montratama¹ Yanyan Mochamad Yani²

¹Institute for Defense and Strategic Research; email: montratama@gmail.com

²Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
Universitas Padjadjaran; email: y.mochamad@unpad.ac.id

Abstract

This article is aim to criticize the theory of balance of power and offer alternative strategy. For more than three centuries, Balance of Power (BOP) theory has served as the core of Realist. However, for lesser state that were facing stronger rivaling alliance power, BOP theory only serves two strategy options: Balancing and Bandwagoning. Both solutions are not fit for neutral lesser states, which should raise the needs for a newly engineered third strategy – that can increase relative power of lesser state, but keep its political neutrality. The third strategy is named Bargaining by Authors – that relies on strategic partnerships as diplomatic instrument.

Keywords: *balance of power, bargaining, strategic partnerships*

Abstrak

Tulisan ini berupaya untuk mengkritisi teori perimbangan kekuatan dan menawarkan strategi alternatif. Telah lebih dari tiga abad Teori Perimbangan Kekuatan (TPK) menjadi konsep utama dari paham Realis. Namun bagi negara lemah dalam menghadapi aliansi lawan yang lebih kuat, TPK hanya menawarkan dua opsi strategi: *Balancing* dan *Bandwagoning*. Kedua solusi itu tidak cocok bagi negara lemah yang netral, sehingga perlu dirancang strategi ketiga – yang mampu meningkatkan kekuatan relatif namun tetap memelihara netralitas politik negara lemah. Strategi ketiga itu penulis sebut dengan *Bargaining* – yang mengutamakan manfaat kemitraan strategis sebagai instrumen diplomasi.

Kata Kunci: bargaining, kemitraan strategis, perimbangan kekuatan

Artikel ini merupakan saduran dari disertasi penulis.

Pendahuluan

Perimbangan kekuatan terus menjadi praktek politik internasional selama lebih dari tiga abad. Ketika suatu negara atau blok negara menjadi terlalu kuat, negara lain menyikapinya sebagai ancaman bagi keamanan dan meresponsnya dengan upaya perimbangan. Baik sendiri maupun dengan bantuan negara lain, untuk meningkatkan kekuatannya (Sheehan, 1996: v, 3). Hanya ada dua opsi yang ditawarkan dalam Teori Perimbangan Kekuatan (TPK); *Balancing* dan *Bandwagoning*. *Balancing* merupakan upaya mengimbangi kekuatan (negara atau aliansi) pesaing dengan membangun kekuatan internal atau aliansi (sebagai kekuatan eksternal). *Bandwagoning* merupakan upaya kompromi dengan kekuatan pesaing untuk menghindari konflik, baik dalam bentuk memenuhi kepentingan pesaing atau menjadi bagian dalam aliansi pesaing.

Kedua opsi tersebut tidak cocok untuk negara lemah dan netral seperti Indonesia. Indonesia yang bersengketa dengan Malaysia atas penguasaan Blok Laut Ambalat (BLA) yang kaya minyak, terjebak dalam situasi perimbangan kekuatan satu sama lain (Kassim, 2005; Harmantyo, 2006; Haryono, 2006; Muhammad, 2014; Yani dan Montratama, 2015; Montratama, 2017). Malaysia tergabung dalam aliansi *Five Power Defense Arrangement* (FPDA) sejak tahun 1971. Sementara Indonesia merupakan negara netral tanpa aliansi. Dalam kaca mata perimbangan kekuatan, Indonesia kalah kuat dari Malaysia dan harus bersiap untuk kehilangan BLA. Negara yang beraliansi cenderung dipersepsikan membahayakan. Perilaku tersebut dapat muncul karena tingginya harapan akan bantuan eksternal (dari aliansi mitra), jika terjadi konflik dengan negara pesaing (Benson, Bentley dan Ray, 2013). Pendapat Benson tersebut dapat menjelaskan perilaku agresif Malaysia atas Indonesia di Blok Laut Ambalat.

Secara agregat, kekuatan militer Indonesia masih lebih lemah jika dibandingkan dengan kekuatan FPDA. Tanpa keberadaan kekuatan militer yang lebih kuat, upaya diplomasi tidak akan efektif, karena tidak memiliki opsi menetralkan ancaman dengan cara kekerasan manakala diperlukan. Sementara bagi Malaysia terdapat insentif untuk melanjutkan sengketa ke konflik bersenjata (karena daya tempur relatifnya yang lebih kuat). Menghadapi perilaku agresif Malaysia ini, Indonesia lebih mengedepankan *softpower* demi mengamankan *status quo*.

Tulisan ini berupaya mengkaji Teori Perimbangan Kekuatan (TPK) dengan studi kasus politik luar negeri Indonesia. TPK dari Hans J. Morgenthau (Morgenthau dan

Thompson, 1985) adalah teori dasar bagi kaum realis klasik maupun neorealis dalam menjelaskan perimbangan kekuatan. Bagi kaum realis, sistem internasional yang menyebabkan anarki membuat negara-negara harus mempertahankan dirinya dengan memperkuat kekuatan internalnya. Tanpa adanya kekuasaan melebihi negara, maka negara-negara cenderung menangkal kebangkitan serangan hegemon dengan membangun kekuatan yang dapat mengimbangi hegemon tersebut.

TPK kemudian dikembangkan oleh neorealis Kenneth Waltz, yang berpendapat bahwa politik perimbangan kekuatan akan berhasil manakala dua syarat terpenuhi, yaitu: sistem internasional tetap anarki dan dunia dipenuhi oleh negara-negara yang hendak mempertahankan eksistensinya. Pertahanan eksistensi ini dilakukan dengan memperkuat kekuatan internalnya melalui pembangunan militer dan ekonomi atau dengan membangun kekuatan eksternal melalui kerjasama dalam aliansi (Dwivedi, 2012). Negara-negara yang diuntungkan dengan struktur kekuatan yang ada disebut sebagai negara *status-quo*. Sedangkan negara yang mengupayakan perubahan perimbangan kekuatan disebut negara revisionis (Waltz, 1979: 118-121).

Indonesia, dengan politik luar negeri bebas aktifnya, memiliki keterbatasan untuk beraliansi dengan kekuatan eksternal (Weinstein, 1976). Politik bebas aktif cenderung dibakukan oleh elite politik Indonesia yang tidak dapat diubah. Sementara untuk membangun kekuatan internalnya secara mandiri, hampir mustahil. Kesenjangan kekuatan militer dan ekonomi antara Indonesia dan negara-negara anggota FPDA serta Amerika Serikat (AS) sangat jauh. Perlu adanya opsi efektif lain bagi Indonesia dalam mengimbangi kekuatan relatif Malaysia dalam aliansi FPDA.

Thayer (2007: 79) berpendapat pada awalnya FPDA bukanlah aliansi, melainkan hanya forum konsultatif. Dalam perkembangannya, FPDA telah menjadi aliansi pertahanan yang tidak kentara (*unobtrusive alliance*), dengan memiliki organisasi yang mapan dan markas tetap di Butterworth, Penang, Malaysia, serta dipimpin oleh perwira tinggi Australia minimal setara dengan bintang dua. Kegiatan FPDA saat ini meliputi latihan *Air Defence Exercises (ADEX)* dan latihan militer gabungan skala besar yang diarahkan untuk menghadapi ancaman keamanan tradisional dan non-tradisional yang meliputi skenario ancaman hingga ke Laut Cina Selatan (Thayer 2007: 80).

Menurut Thayer, dalam Buku Putih Pertahanan Australia tahun 1997 dan Buku Putih Pertahanan Singapura tahun 2000, ditegaskan bahwa FPDA adalah bagian penting dari arsitektur pertahanan Negara FPDA yang berperan sebagai penangkal psikologis untuk semua penyerang termasuk Indonesia. Dalam kerangka FPDA, penyerangan terhadap Malaysia atau Singapura akan direspon oleh Australia, Selandia Baru dan Inggris. Jika Australia dan Inggris terlibat perang, maka AS berpotensi untuk terlibat perang (2007: 92).

FPDA memberi manfaat bagi seluruh negara anggotanya. Singapura dan Malaysia mendapatkan daya tangkal tambahan dari kekuatan yang tidak terpisahkan. Nilai FPDA bagi Singapura lebih tinggi daripada nilai FPDA bagi Malaysia, karena FPDA memberi manfaat bagi postur pertahanan umum Singapura. Malaysia memandang FPDA sebagai suplemen dari kebijakan pertahanan. Melalui FPDA, Malaysia mendapat akses kepada persenjataan yang lebih canggih dan doktrin operasi yang lebih mapan (2007: 93).

Dalam membaca fenomena ini, penulis mengajukan opsi ketiga (selain *balancing* dan *bandwagoning*) yang disebut dengan *Bargaining*. *Bargaining* merupakan upaya pembangunan kerjasama melalui kemitraan strategis yang tidak mengikat namun dapat ditingkatkan hingga bersifat kuasi-aliansi. Kemitraan strategis merupakan kerjasama erat yang bersifat bilateral maupun multilateral atas suatu bidang tertentu, termasuk bidang pertahanan-keamanan. Kemitraan strategis menjadi instrumen diplomasi dalam politik internasional yang bersifat fleksibel, dikarenakan tidak bersifat mengikat dan terdapat kesetaraan antar negara mitra. Walau secara formal tidak mengikat, kemitraan strategis dapat dibangun sedemikian rupa sehingga secara nyata bersifat kuasi-aliansi, seperti yang ditunjukkan dalam kemitraan strategis Singapura dengan AS.

Kemitraan Strategis Indonesia Cina

Walaupun Indonesia telah menetapkan sebagai negara Non Blok (*Non Aligned*), namun telah terjadi fenomena *alignment* antara Indonesia dengan Cina yang dikenal dengan *Strategic Comprehensive Partnership* (SCP) di tahun 2013.² Pernyataan Bersama tentang kemitraan strategis Cina dan Indonesia ditandatangani oleh kedua kepala negara

² Isi kesepakatan bilateral tersebut dapat dilihat pada situs Kementerian Luar Negeri RI, dengan tautannya pada: <http://kemlu.go.id/Documents/RI-RRT/Joint%20Statement%20Comprehensive%20Strategic%20Partnership.pdf>. [Kemitraan strategis sejenis yang menyangkut bidang keamanan juga dibangun Indonesia dengan lima negara lain, yaitu: Amerika Serikat, Korea Selatan, Turki, Australia dan Jepang.](#)

pada tanggal 25 April 2005 dan Rencana Aksi tahun 2010-2015 ditandatangani pada tanggal 22 Januari 2010. Sedangkan penandatanganan SCP dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2013. Kemitraan ini meliputi bidang: (1) politik, keamanan dan pertahanan; (2) kerjasama ekonomi dan pembangunan; (3) maritim, penerbangan, ilmu pengetahuan dan teknologi; (4) kerjasama sosial dan budaya; (5) kerjasama regional dan internasional. Khusus untuk masalah pertahanan, Presiden Yudhoyono dan Presiden Xi Jinping bersepakat untuk melakukan kerjasama pertahanan bilateral dan meningkatkan kepercayaan kedua belah pihak melalui konsultasi pertahanan dan keamanan serta meningkatkan kerjasama pada bidang keamanan maritim, industri pertahanan, serta keamanan non tradisional (Kuik, 2015).

SCP di atas bersama sejumlah kemitraan strategis lain yang dibangun Indonesia, dapat menjadi wahana dalam menghadapi ancaman yang tidakimbang (*imbalance threat*) dari Malaysia yang berperilaku agresif. Wilkins (2013) berpendapat bahwa kemitraan strategis merupakan satu dari empat bentuk *alignment*. Tiga lainnya adalah aliansi, koalisi, dan komunitas keamanan.

Kemitraan strategis adalah *platform* diplomasi yang sudah tersedia (yang sudah diratifikasi) yang dapat dimanfaatkan Indonesia (Zhongping dan Jing, 2014). Kajian atas kemitraan strategis dengan Cina di tulisan ini dilandasi teori Walt tentang penyebab runtuhnya aliansi. Karena kemitraan strategis dengan hegemon regional yaitu Cina diproyeksikan sebagai penyeimbang kekuatan aliansi lawan. Walt berpendapat bahwa aliansi akan runtuh, jika terjadi: (1) perubahan persepsi ancaman, (2) penurunan kredibilitas aliansi, dan (3) perubahan politik domestik di negara-negara anggota aliansi (Walt, 1997: 156-179).

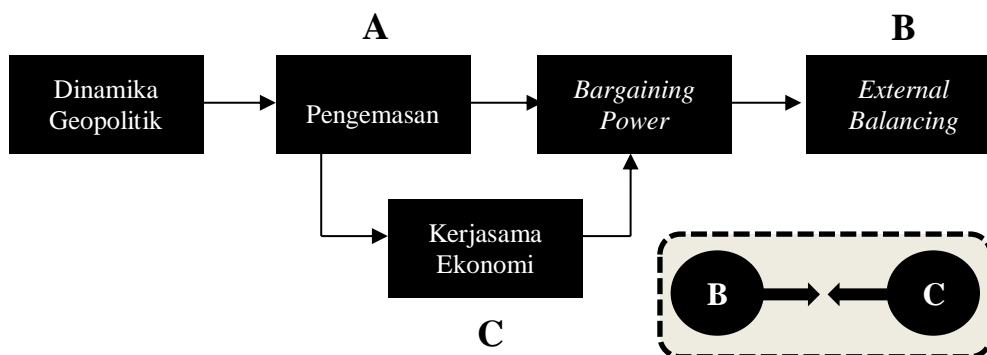
Menurut TPK, dalam menghadapi situasi ketidak-seimbangan kekuatan seperti antara Indonesia v. FPDA, hanya ada dua solusi yang harus ditempuh: *balancing* – dengan memperkuat kekuatan internal atau beraliansi dengan kubu pesaing aliansi lawan – atau *bandwagoning* – yaitu tindakan mengalah atas kehendak negara rival.

Untuk memperkuat kekuatan internal, kondisi ekonomi Indonesia masih terlalu lemah untuk dapat mengimbangi kekuatan ekonomi negara-negara FPDA. Sementara itu, karena terpasung oleh (interpretasi doktrin) politik bebas aktifnya, Indonesia juga tidak dapat beraliansi. Sedangkan *bandwagoning* yang merupakan kompromi atas

kepentingan negara lain merupakan ekspresi lain dari kekalahan. *Bandwagoning* menjadi hal yang paling dihindari negara mana pun.

Sebagai ilustrasi (lihat gambar 1 di halaman berikut), dimisalkan Negara A hendak mendapatkan kekuatan eksternal dari Negara B. Negara A mengemas sedemikian rupa sumber daya yang dimilikinya (seperti lokasi geografis, sumber daya alam, populasi, dan lainnya) untuk meningkatkan *bargaining power* Negara A terhadap B (sebagai mitra di bidang politik dan keamanan). Namun, Negara A juga kemudian membangun kemitraan strategis dengan negara rival B, yaitu C (di bidang ekonomi). Dengan C, negara A awalnya membatasi diri untuk bekerjasama di bidang ekonomi semata. Namun, manakala B kurang responsif dalam mendukung kepentingan Negara A terutama di bidang politik dan keamanan, maka negara A dapat mulai membangun kerjasama di bidang keamanan dengan C *semata-mata* untuk meningkatkan *bargaining power*-nya terhadap B. Manakala B menjadi lebih mengakomodir keinginan negara A, maka Negara A dapat (kembali) membatasi kerjasama keamanannya dengan negara C [kotak kecil di pojok kanan bawah adalah simbol rivalitas Negara B dan Negara C].

Gambar 1. Pola *Bargaining* Dua Mitra Strategis yang Saling Berkompetisi



Tulisan ini berupaya untuk membangun argumen logis bahwa kemitraan strategis dapat menjadi instrumen diplomasi yang efektif dalam mengamankan kepentingan Indonesia dalam politik internasional.

Balancing, Bandwagoning dan Hedging

Walt (1987) memodifikasi TPK Morgenthau (1948) dengan menekankan peran persepsi ancaman dalam menstimulasi perilaku antarnegara. Walt berpendapat bahwa negara cenderung mengimbangi ancaman yang ditimbulkan negara lain – bukan dari kekuatan yang dimilikinya (Paul, Fortman, & Wirtz, 2004: 8). Contohnya adalah kebijakan

Kanada untuk menjadi sekutu AS. Kanada yang memiliki *power* lebih lemah seharusnya mengimbangi kekuatan AS dengan beraliansi dengan Rusia agar kekuatan dunia mencapai keseimbangan. Namun, Kanada lebih memilih beraliansi dengan AS yang justru memperburuk ketidakseimbangan kekuatan antara AS dan Rusia. Kanada nyatanya memang tidak merasa terancam dengan kekuatan besar AS. Sebaliknya, terhadap Rusia atau Cina yang memiliki budaya dan suku bangsa asing bagi mayoritas rakyat Kanada. Terlebih pada era Perang Dingin, Rusia dan Cina merupakan musuh politik Blok Barat yang mana Kanada berada di dalamnya.

Selanjutnya Walt (1987) berpendapat bahwa ada empat faktor yang membangun persepsi ancaman, yaitu: kekuatan agregat (lawan), kedekatan geografi (*proximity*), kemampuan ofensif dan intensi ofensif. Tidak seluruh faktor tersebut memiliki bobot yang sama dari suatu ancaman. Satu faktor dapat lebih dominan dari yang lain. Jika melanjutkan contoh hubungan Kanada dan AS, faktor yang menegaskan persepsi AS sebagai ancaman bagi Kanada adalah ketiadaan intensi ofensif AS terhadap Kanada. Walau AS memiliki kekuatan agregat yang lebih besar, dekat secara geografi, dan memiliki kemampuan ofensif. Namun, elit politik Kanada merasa yakin AS tidak memiliki intensi ofensif terhadap Kanada. AS yang memiliki status sebagai negara demokratis tertua dan penjunjung Hak Asasi Manusia yang dipersepsikan Kanada tidak akan menjadi negara ekspansionis yang menganeksasi Kanada. Terlebih kedua negara didominasi oleh akar budaya yang sama, yaitu budaya Inggris.

Situasi yang berbeda terjadi pada pola hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Malaysia tidak memiliki kekuatan militer agregat yang lebih besar jika dibandingkan Indonesia. Namun, jika kekuatan aliansi FPDA-nya diperbandingkan, maka jelas kekuatan Malaysia lebih besar dari kekuatan Indonesia. Malaysia juga memiliki kedekatan geografis dan sedang bersengketa wilayah perbatasan dengan Indonesia. Sengketa yang paling menonjol adalah sengketa batas perairan di BLA yang kaya sumber daya alam.

Untuk meningkatkan kemampuan tempur ofensif terutama bagi operasi gabungan kekuatan tempur udara dan lautnya, FPDA secara rutin berlatih untuk meningkatkan koordinasi dan kecepatan manuver tempurnya. Hal itu menjadi tanda bahwa FPDA memiliki kemampuan ofensif nyata. Sedangkan dari segi intensi ofensif dapat dilihat

dari sejumlah perilaku provokatif Malaysia di BLA sejak tahun 2005 hingga 2014. Perilaku menantang *status quo* menggambarkan niat Malaysia untuk memprovokasi, walau sekedar dalam wujud *test the water* untuk mengetahui respons militer Indonesia. Semakin Indonesia melakukan pembiaran, maka Malaysia akan semakin intens untuk melaksanakan tantangannya.

Dengan kedua contoh tersebut, modifikasi TPK versi Walt lebih mampu menjelaskan perilaku negara dalam politik internasional. Selanjutnya Walt (1987) menawarkan dua solusi bagi negara yang menghadapi ketidakseimbangan kekuatan, yaitu *balancing* atau *bandwagoning*.

Dua solusi yaitu *balancing* dan *bandwagoning* yang ditawarkan Walt (1987) tidak sejalan dengan sifat negara Non-Blok. Sifat Non-Blok tidak memungkinkannya untuk melakukan *bandwagoning*. Sedangkan untuk *balancing* yang bersifat eksternal berupa aliansi juga tidak mungkin dilakukan. Namun, membangun kekuatan militer membutuhkan sumber daya finansial yang sangat besar. Bagi negara berkembang yang masih membutuhkan alokasi sumber daya untuk sektor ekonomi akan memiliki keterbatasan dalam membangun kekuatannya. Contohnya, Indonesia, di mana hampir sejak era Orde Baru, alokasi anggaran pertahanan Indonesia selalu di bawah 1% dari PDB (Kementerian Pertahanan RI, 2015).

Di tengah ketiadaan solusi yang dianggap cocok bagi negara Non-Blok dalam menghadapi ketidakseimbangan kekuatan, Kuik menambahkan satu solusi baru yang bernama *hedging*. *Hedging* didefinisikan sebagai perilaku pengimbangan kekuatan melalui sejumlah opsi kebijakan untuk menghasilkan efek yang diharapkan dalam situasi yang penuh ketidakpastian dan penuh resiko (Kuik, 2008: 163). Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan terbangunnya aliansi tersebut. Kuik berpandangan negara yang lemah harus membangun hubungan yang sangat positif sedari dini dengan pihak-pihak yang berpotensi menjadi negara mitra aliansinya. Walaupun, mereka saling berkompetisi. Hubungan baik harus dibangun sedemikian rupa agar jika *lesser state* dalam kondisi terdesak, proses yang dibutuhkan untuk membangun aliansi dapat cepat dibangun dan *lesser state* akan terhindar dari petaka akibat serangan negara atau aliansi lawan yang lebih kuat. Namun, jika *lesser state* bergabung dalam suatu aliansi, maka negara itu melepas statusnya sebagai Negara Non-Blok.

Bargaining : Solusi Jalan Tengah

Berbeda dengan *hedging*, penulis menawarkan suatu konsep baru dengan nama *Bargaining*.³ Dalam *bargaining*, *lesser state* tidak berharap membangun aliansi di kemudian hari. Orientasi dalam *bargaining* adalah dalam proses dan bukan *output*-nya. Dalam hal ini, *lesser state* mempertahankan status negara Non-Blok namun memanfaatkan setiap peluang dari perubahan struktur keamanan yang terbangun dan dinamikanya di masa depan. Pemanfaatan struktur keamanan dilakukan dengan membangun hubungan kerjasama dari negara-negara yang berpengaruh bagi keamanannya berdasarkan skala prioritas. Prioritas kerjasama itu dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok politik dan keamanan dan kelompok ekonomi.

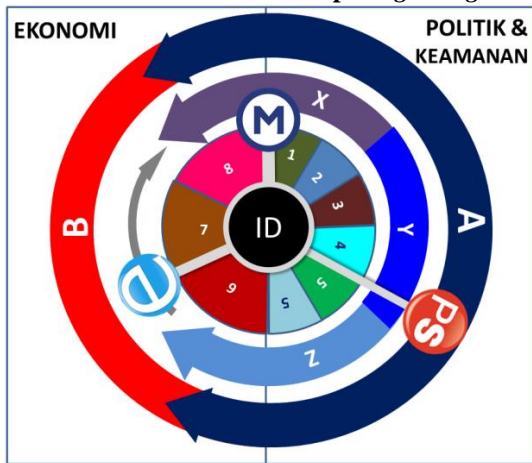
Pembagian kelompok prioritas kerjasama ini ditujukan untuk mengoptimalkan nilai manfaat nyata dari mitra kerjasama strategis yang memiliki nilai yang dianggap paling bermanfaat bagi kepentingan nasional *lesser state*. Pengelompokan mitra kerjasama ke dalam dua kelompok ini (ekonomi dan keamanan) perlu diupayakan untuk tetap terbagi secara konsisten.

Namun demikian, *lesser state* harus mampu mengembangkan diplomasinya secara cerdas untuk mengoptimalkan nilai manfaat dari kerjasama di tiap kelompok kerjasama tersebut. Manakala ada negara mitra kerjasama yang kurang mau bekerjasama dengan optimal, maka *lesser state* dapat beralih untuk memacu manfaat yang diinginkan dari kelompok yang lainnya. Namun, hal itu dilakukan semata-mata untuk meningkatkan *bargaining power* terhadap mitra kerjasama di kelompok sebelumnya.

Dalam konsep *bargaining*, politik internasional dipersyaratkan terbagi dalam dua kekuatan utama secara bipolar yaitu keduanya saling bersaing. Untuk memvisualisasikan maksud dari konsep *bargaining* ini, berikut disajikan gambar konsep *bargaining* yang terdiri dari tiga lingkaran berlapis.

³ Bargaining merupakan nama konsep baru Penulis dengan preposisinya memanfaatkan instrumen kemitraan strategis dengan hegemon global (AS) dan hegemon regional (Cina) yang saling bersaing untuk mengambil manfaat dari keduanya di bidang pertahanan dan ekonomi.

Gambar 2. Visualisasi Konsep *Bargaining*



Pada lapisan terluar, ada dua setengah lingkaran yang mewakili dua kekuatan bipolar yang saling bersaing, yang diwakili oleh Negara A dan Negara B. *Lesser state* (ID) yang berada di tengah, sebagai subjek dalam politik internasional yang sedang dihadapi), menempatkan Negara A sebagai mitra utama di bidang kerjasama politik dan keamanan (yang diwakili oleh bandul PS) dan Negara B sebagai mitra utama di bidang kerjasama ekonomi (yang diwakili oleh bandul E). Fungsi bantul PS dan E hanya sebagai simbol penguat bidang kerjasama.

Dalam kerangka di atas, perimbangan kekuatan yang dianut bersifat *multiple*, yaitu kekuatan terbangun dari sejumlah negara dengan penjurutamanya adalah negara A dan B. Kedua negara ditopang oleh negara-negara aliansi dan mitra strategis masing-masing, yang membentuk suatu akumulasi kekuatan di bidang politik serta ekonomi.

Akumulasi kekuatan di sektor politik dan ekonomi memiliki daya tariknya masing-masing dalam menggalang kekuatan terhadap negara yang belum menjadi negara aliansi atau mitra strategis negara A atau B. Pada sektor politik, negara A atau B sama-sama mampu memberikan perlindungan keamanan. Sedangkan pada sektor ekonomi, negara A atau B sama-sama mampu menawarkan peluang akselerasi pertumbuhan ekonomi kepada negara sekutu atau mitranya. Profil dari negara A dan B idealnya terbagi menjadi dua, yaitu salah satu menjadi negara terkuat di sektor politik dan keamanan dan yang lainnya menjadi negara terkuat di sektor ekonomi.

Logika pemilihan Negara A sebagai mitra strategis di bidang politik dan keamanan adalah karena Negara A memiliki kekuatan militer yang lebih besar daripada

B. Negara A pun memiliki *alignment* yang lebih luas dan intensif dengan sejumlah negara di kawasan. Sedangkan, logika pemilihan negara B sebagai mitra di bidang ekonomi, karena selain negara B memiliki kekuatan ekonomi yang besar, ia juga menjadi rival dari negara A di bidang politik dan keamanan.

Sedangkan pada lapisan kedua dari Gambar 2 di atas, terdiri dari sejumlah *middle power* yang berpengaruh terhadap *lesser state* ID. *Middle powers* ini pun terbagi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah sejumlah negara yang memiliki traktat keamanan dengan negara A. Sedangkan kelompok kedua adalah negara-negara yang memiliki traktat keamanan dengan Negara B. Keberadaan *middle powers* penting untuk dikaji karena dengan kekuatan relatifnya, dapat menjadi peluang dan ancaman yang signifikan bagi kepentingan nasional *lesser state* ID.

Lapisan terakhir (dari Gambar 2) adalah negara-negara sesama *lesser state* di kawasanyang juga terbagi dalam dua kelompok. Pihak yang condong terafiliasi ke Negara A dan yang condong ke Negara B. Negara-negara *lesser state* juga penting untuk dipahami posisi politiknya, karena dengan kekuatan relatifnya juga dapat menjadi peluang atau ancaman bagi *lesser state* ID.

Selain bandul bipolar, *lesser state* juga harus memperhatikan regionalisme atau multilateralisme negara yang memiliki keanggotaan dan pengaruh signifikan di organisasi multilateral tersebut. Organisasi multilateral merupakan platform yang efektif untuk memperjuangkan aspirasi nasional yang selaras dengan aspirasi kawasan karena memiliki efek multiplier dalam komunikasinya ke politik kawasan ataupun dunia. Upaya memanfaatkan multilateralisme disimbolkan dengan bandul (M).

Dalam menjelaskan konsep Bargaining, maka berikut ini digunakan contoh kebijakan luar negeri Indonesia dalam menghadapi ketidak-seimbangan kekuatan dari FPDA. Sebagai mitra utama kelompok pertama (dibidang politik dan keamanan) lebih tepat ditujukan kepada AS dan negara-negara sekutunya, karena AS adalah hegemon dunia dengan jaringan keamanan yang terluas di dunia. Sedangkan, untuk kelompok kedua dibidang ekonomi lebih tepat ditujukan kepada Cina dan mitra-mitra dekatnya, karena Cina semakin agresif memberikan bantuan pembangunan ke sejumlah negara ketiga (Godement, 2015).

Dalam mengoptimalkan nilai manfaat dari kemitraan dengan AS, Indonesia harus membangun *alignment* yang dapat dilakukan sebagai negara Non-Blok, dalam hal ini kemitraan strategis, sehingga mencapai status kuasi-aliansi menyerupai kemitraan strategis antara AS-Singapura saat ini. Tujuannya adalah agar terbentuknya suatu harapan yang mendekati kepastian bahwa AS akan membantu Indonesia jika Indonesia terlibat konflik dan sebaliknya. Kuasi-aliansi tersebut akan menambah kekuatan eksternal Indonesia yang pada gilirannya akan meningkatkan daya tangkal Indonesia terhadap negara-negara potensi lawan.

Sementara itu, dengan kelompok ekonomi, Indonesia harus mengoptimalkan manfaat yang didapat dari kerjasama dengan Cina melalui bentuk investasi Cina dalam pembangunan prasarana Indonesia. Kedua negara harus menemukan keselarasan untuk menghasilkan keuntungan ekonomi bersama dalam status yang setara dan tanpa mencampuri urusan domestik masing-masing.

Dalam prakteknya, sistem ekonomi pasar terpimpin, Cina telah memungkinkan ekspansi investasi Cina secara lintas negara, yang relatif imun dari aspek politik. Artinya, aktivitas investasi dan perdagangan Cina tidak terlalu dibatasi dengan agenda politik negaranya. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingginya investasi dan perdagangan AS, India, Taiwan, dan Vietnam yang merupakan rival politik RRC ke Cina dan sebaliknya. Hal tersebut memberi insentif kepada *lesser state* untuk menjadikan Cina sebagai mitra kelompok kerjasama ekonomi.

Dalam kerjasama di bidang politik dan keamanan dengan AS, hambatan dapat muncul dengan berbagai alasan. Contohnya, dalam keinginan Indonesia untuk menguasai teknologi pembuatan radar jet tempur berjenis *Active Electronic Scanned Array* (AESA), AS mungkin menolak untuk memberi akses kepada industri pertahanan Indonesia. Namun, sebagai bentuk diplomasi dan negosiasi tidak langsung kepada AS, Indonesia dapat “melirik” kepada Cina untuk mendapatkan akses ke teknologi persenjataan lain seperti teknologi rudal balistik, satelit, pesawat tanpa awak, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk menekan AS agar memberi akses kepada Indonesia atas teknologi radar AESA-nya.

Sebaliknya, dalam kerjasama ekonomi dengan Cina, diandaikan telah terjadi kesepakatan bahwa Cina akan berinvestasi mengembangkan Pulau Batam sebagai *Global Transshipment Port* sekaligus Kawasan Ekonomi Khusus. Namun, dalam

pelaksanaanya, Cina tidak terlalu serius untuk menjalankan kesepakatannya, Indonesia dapat memberi akses kepada AS untuk meningkatkan investasinya di Pulau Natuna yang memiliki posisi geografis yang sangat strategis bagi geopolitik Cina (terkait dengan Peta Sembilan Garis Putus). Jika AS memiliki akses ke Pulau Natuna, maka Cina tentu juga akan berharap mendapatkan akses pula.

Penulis mengusulkan AS dijadikan sebagai negara mitra utama di bidang politik dan keamanan bagi Indonesia. Sedangkan Cina dijadikan mitra utama di bidang ekonomi. Di bidang politik dan keamanan, AS memiliki tiga negara mitra yang masuk dalam *middle powers* yang berpengaruh terhadap Indonesia, yaitu Jepang, Australia dan India. Sementara itu, sejumlah *lesser states* menjadi negara mitra formal AS dalam bidang politik dan keamanan, seperti Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia, Singapura dan Brunei. Namun dalam tataran praktis, sejumlah negara mitra AS tersebut menerapkan kebijakan *decoupling* ke RRC, seperti yang terjadi pada Thailand, Filipina, dan Malaysia.

Sehingga, negara-negara yang terafiliasi dengan Cina umumnya berstatus *lesser state*, seperti Myanmar, Kamboja dan Laos. Cina tentu memiliki kepentingan untuk memiliki *middle power* yang tergabung dalam kelompoknya. Niat Cina untuk membantu meningkatkan status negara kelompoknya dari *lesser state* menjadi *middle power* masih belum tampak nyata.

Sementara itu, di luar kekuatan bipolar yang ada, Indonesia dituntut untuk mampu memanfaatkan kekuatan regionalisme ASEAN yang memiliki status terhormat di panggung internasional. Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, secara alami memiliki hak untuk menjadi pemimpin alamiah ASEAN. Sehingga, Indonesia harus mampu menetapkan kebijakan luar negeri, di satu sisi mengamankan kepentingan Indonesia, dan di sisi lain juga memperjuangkan kepentingan ASEAN yang majemuk.

Efektivitas kebijakan luar negeri *bargaining* sangat bergantung dari arah dan interaksi diplomasi Indonesia dengan negara mitranya. Bingkai *bargaining* dengan menetapkan sejumlah negara sebagai mitra di bidang politik dan keamanan serta di bidang ekonomi baru setengah jalan. Diperlukan tindakan lebih lanjut dengan menetapkan sejumlah sasaran yang ingin dihasilkan dari interaksi dengan negara-negara mitra tersebut.

Namun, tujuan utama dari kebijakan luar negeri, *bargaining* yang didasari perspektif neorealis adalah terciptanya kuasi-aliansi dengan negara mitra strategis di bidang politik dan keamanan. Negara mitra strategis di bidang ekonomi sesungguhnya merupakan katalis bagi terselenggaranya hubungan yang efektif di bidang politik dan keamanan. Manakala hubungan dengan mitra keamanan tidak efektif, maka hubungan keamanan dengan mitra ekonomi ditonjolkan, meskipun hal itu semata-mata dilakukan untuk membuat hubungan keamanan dengan mitra keamanan kembali berjalan dengan frekuensi yang cukup sering.

Bingkai Tripolar: AS, Cina dan ASEAN

Dalam menghadapi ketidakseimbangan kekuatan FPDA, Indonesia harus mengkaji struktur keamanan di Asia Tenggara untuk dapat memanfaatkannya demi kepentingan nasional Indonesia. Di Asia Tenggara, setidaknya ada tiga kutub kekuatan besar yang sangat berpengaruh, yaitu: AS, Cina, dan ASEAN.

Kebangkitan ekonomi Cina yang fenomenal disertai kemajuan teknologi pertahanan dan luar angkasa telah membuat AS menjadikan Cina sebagai ancaman keamanan utama di dunia,. Dari perang atas teror menuju perimbangan kekuatan dengan kebangkitan negara yang dapat menggeser kedudukan AS sebagai hegemon di bidang ekonomi, teknologi, dan militer.

Pasca era Perang Dingin, AS mewaspadaikan kebangkitan Cina dan menerapkan strategi *containment* terhadap Cina. AS membendung pengaruh politik Cina dengan membangun *alignment* dengan sejumlah negara di sekitar Cina seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Australia, Selandia Baru dan yang sedang dalam proses adalah Vietnam. Sebagian besar diikat dalam wujud aliansi dan sisanya dalam bentuk kemitraan strategis. AS juga memiliki sejumlah konsentrasi kekuatan di sekitar Asia Pasifik, seperti di Hawaii, Guam, Darwin, Pulau Christmast, Diego Garcia, dan Pangkalan di Singapura. Seperti telah disebutkan bahwa dalam FPDA terdapat tiga negara sekutu AS: Inggris; Australia; dan Selandia Baru.

Dalam menghadapi aliansi FPDA, justru peran AS sangat dominan. Sehingga walaupun paper ini mengkaji tentang kemitraan Indonesia dan Cina dalam mengimbangi aliansi FPDA, namun sesungguhnya peran AS tidak dikesampingkan

sama sekali. Bahkan, kemitraan Cina dan Indonesia digunakan sebagai instrumen *bargaining* dalam meningkatkan kualitas kemitraan Indonesia dan AS.

Dengan sumber daya finansial yang cukup besar, Cina mulai mengembangkan *alignment* dalam bentuk multilateralisme. Cina menginisiasi dibentuknya *Regional Comprehensive Economic Partnerships* (RCEP) yang menandingi regionalisme *Trans-Pacific Partnerships* (TPP) yang digagas Presiden Obama. RCEP merupakan rejim perdagangan bebas yang diberi insentif pinjaman lunak dan investasi langsung dari Cina.

Tidak cukup dengan RCEP, Cina pun menginisiasi pembentukan lembaga pinjaman bernama *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) untuk menyaingi Bank Dunia, IMF, dan ADB yang dinilai ditunggangi kepentingan politik negara-negara maju. AIIB ini juga merupakan elemen tak terpisahkan dari kebijakan jalur sutra aritim abad ke-21. Cina yang difokuskan dalam pembangunan infrastuktur maritim di sejumlah pelabuhan yang terkoneksi dengan rute pelayaran ke Cina.

Kekuatan terakhir di Asia Tenggara yang patut untuk diperhitungkan adalah regionalisme dalam *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) yang terdiri dari seluruh negara Asia Tenggara (kecuali Timor Leste). Perkembangan regionalisme ASEAN sempat vakum di era 1990-an ketika terjadi resesi ekonomi di Asia Timur. Namun di abad ke-21 ini, perkembangan ASEAN berlangsung sangat drastis pada akhir tahun 2015 yang secara efektif berdirinya Masyarakat ASEAN (MA) yang terdiri dari tiga pilar: Politik-Keamanan, Ekonomi dan Budaya.

Walaupun Masyarakat ASEAN telah disusun ke dalam peta jalan dan rencana aksi yang komprehensif, namun dalam prakteknya ASEAN bukanlah rejim keamanan atau pakta pertahanan maupun pasar terbuka. ASEAN masih mengedepankan prinsip *non-interference* atas urusan domestik masing-masing anggota. Tujuan utama ASEAN adalah untuk menciptakan sub-kawasan yang terbebas dari pengaruh intramural yang berpotensi menjadi ajang rivalitas kekuatan-kekuatan besar dunia.

Real politik tiga kutub kekuatan (AS, Cina, dan ASEAN) itulah yang harus “dimainkan” Indonesia dengan tujuan utamanya adalah memaksimalkan kepentingan nasional dalam persaingan politik internasional.

Dalam membangun bingkai tripolar, yang perlu ditentukan adalah dua polar *great*

powers yang saling berkompetisi dan satu polar multilateralisme atau regionalisme yang dapat menjadi instrumen pengimbang dari pengaruh kedua polar pertama. Dalam konteks Indonesia, ketiga polar itu meliputi: AS, Cina, dan ASEAN.

Untuk polar AS, bingkai itu meliputi pula negara sekutunya yang penting bagi Indonesia seperti Australia. Sedangkan, untuk multilateralisme atau regionalisme yang ideal adalah yang tidak dianggotai oleh salah satu dari polar yang telah ditentukan. Hal itu untuk menjaga sentralitas atau netralitas organisasi internasional tersebut dalam perannya sebagai pengimbang (*balancer*).

Intrumen diplomasi dalam berinteraksi dengan ketiga polar itu adalah dengan menggunakan kemitraan strategis bagi AS, Australia, dan Cina serta komunitas keamanan di dalam multilateralisme atau regionalisme (ASEAN). Tidak seluruh organisasi internasional memiliki format komunitas keamanan seperti ASEAN. Namun, organisasi internasional umumnya memiliki peran sebagai forum komunikasi dan koordinasi antar negara anggota yang dapat dioptimalkan untuk menyatukan suara dalam menyikapi isu-isu keamanan di kawasannya. Karena penyatuan suara itulah yang menjadi esensi dari komunitas keamanan. Komunitas keamanan bukanlah rezim keamanan ataupun pakta pertahanan. *Output* dari komunitas keamanan hanyalah tekanan diplomasi untuk menghindari konflik (*conflict avoidance*) tanpa memiliki lengan militer untuk melakukan tindakan yang bersifat koersif.

Kebijakan *Strategic Pole*

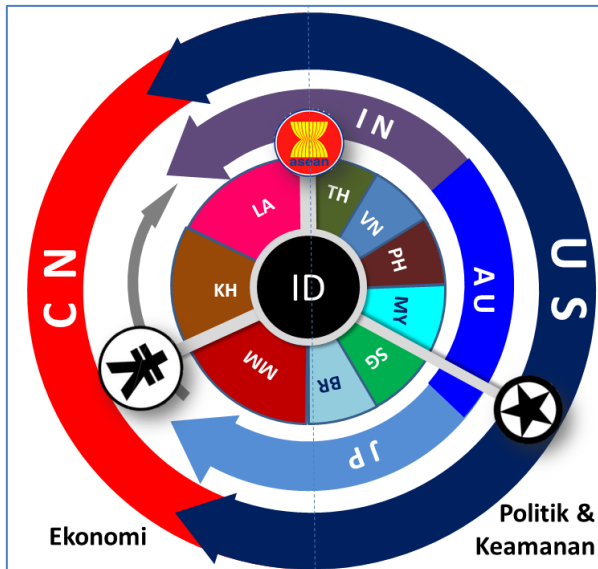
Jika kepentingan nasional telah didefinisikan, maka selanjutnya perlu dibangun kerangka kebijakan luar negeri yang tepat untuk “memainkan” tiga kutub kekuatan di Asia Tenggara. Penulis menawarkan konsep *strategic pole* yang merupakan kompas orientasi kerjasama yang dibangun atas sejumlah negara yang berpengaruh di Asia Timur yang dapat membantu Indonesia mengamankan kepentingannya (seperti yang dijelaskan di sub bagian sebelumnya).

Hal terpenting pada bagian ini adalah bagaimana Indonesia memilih negara mitra bidang keamanan dan negara mitra bidang ekonomi (sebagai penguat *bargaining power* Indonesia ke negara mitra keamanan). Karakter kedua negara mitra tersebut tentunya haruslah sama-sama *great powers* yang saling bersaing satu sama lain dan memiliki kekuatan militer dan ekonomi yang sama-sama kuat.

Suatu kebetulan yang menguntungkan Indonesia bahwa lanskap keamanan di Asia Timur telah menempatkan AS dan Cina sebagai *great powers* yang saling bersaing. Indonesia berada di suatu kawasan yang menjadi ajang kompetisi AS dan Cina. AS sebagai hegemon global memiliki jaringan sekutu dan kemitraan di bidang keamanan yang paling luas di dunia. Justru sejak tahun 1950-an, AS melalui Doktrin Nixon dan dilanjutkan dengan strategi *containment* di era Presiden Barack Obama telah mengepung Cina di Asia Timur. Sementara Cina sebagai raksasa ekonomi dan militer yang baru bangkit masih terus membangun fondasi kekuatan walau masih rapuh karena citra (*image*) yang terbentuk atas Cina cenderung negatif. Hal tersebut tentu mendikte pilihan bagi Indonesia untuk menjadikan AS sebagai mitra strategis di bidang keamanan yang utama dan Cina sebagai mitra strategis di bidang ekonomi.

Negara-negara di Asia Timur itu dibagi ke dalam dua kelompok utama, yaitu kelompok politik dan keamanan dengan AS sebagai penjurunya dan kelompok ekonomi dengan Cina sebagai penjurunya. Dalam kelompok pertama, terdapat tiga negara *middle power* yang terikat *alignment* dengan AS, yaitu: Australia, Jepang, dan India (AJI). Ketiga negara sedang membangun suatu *alignment* tersendiri yang dimulai oleh Jepang dan India yang digambarkan oleh PM Shizo Abe dalam pidato yang berjudul *The Confluence of the Two Sea*. Australia masuk belakangan dengan konsepsi Indo-Pasifik yang dijadikan *strategic arch* dalam membangun ikatan dengan sesama *middle power* di kawasan. Di bawah AJI, terdapat sejumlah *lesser states* dengan kekuatan yang beragam, namun terikat dalam *alignment* dengan AS yang terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Brunei. Walaupun Singapura menjadi negara dengan luas terkecil, namun memiliki kekuatan ekonomi dan militer terbesar.

Gambar 3. Kerangka *Bargaining* Indonesia



Pada kelompok pertama ini, kepentingan Indonesia berada pada aspek keamanan dan kedaulatan. Tujuan yang hendak dicapai dari kerjasama dengan kelompok pertama ini adalah Indonesia harus menjadi negara yang kuat secara militer dan disegani kedaulatannya. Caranya adalah dengan membangun kemitraan strategis dengan pimpinan kelompok pertama, yaitu AS. Dengan demikian, dapat memberi Indonesia akses atas teknologi militer dan luar angkasa AS ditambah dukungan politik AS pada Indonesia dalam bentuk kuasi-aliansi (Garnaut, 2014).

Untuk menghasilkan hal di atas, tentunya perlu ada insentif yang ditawarkan Indonesia kepada pihak AS. Indonesia memiliki dua hal yang diinginkan AS dan juga diinginkan oleh negara-negara besar lainnya, yaitu sumber daya alam dan posisi geografis yang strategis. AS membutuhkan pasokan sejumlah sumber daya alam sebagai energi dan bahan baku untuk industrinya yang bisa didapat dari Indonesia. Sementara itu, posisi geografis Indonesia berada pada jalur pelayaran menghubungkan Samudra Hindia dengan Pesisir Barat AS. Dengan dua modal itu, Indonesia perlu secara cerdas, dan arif dalam memanfaatkannya sebagai instrumen diplomasi kepada AS dan kelompoknya.

Dengan kelompok Cina, orientasi diplomasi Indonesia harus dipusatkan pada akselerasi kemajuan pembangunan ekonomi Indonesia. Cina yang telah mencanangkan kebijakan *Belt and Road Initiative* (BRI) memiliki intensi yang sangat besar untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dengan Indonesia. Kebangkitan Cina yang didasarkan pada pembangunan KEK di pesisir Cina merupakan suatu model

pembangunan ekonomi yang pantas untuk diikuti Indonesia. Niat Cina pada kerjasama ekonomi harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kemajuan ekonomi Indonesia.

Dari penjelasan di atas, konsep *bargaining* yang dikemukakan memantapkan pilihan penjuror kemitraan di sektor keamanan dengan AS dan penjuror kemitraan di sektor ekonomi dengan Cina. Konsep *bargaining* ini sama sekali berbeda dengan *hedging* (Kuik, 2010), yang tidak secara jelas menetapkan siapa mitra penjuror di sektor ekonomi dan politiknya dan yang pada situasi kritis akan mengarah pada pembentukan aliansi. Dalam konsep *bargaining*, tidak ada orientasi menjadi negara aliansi sama sekali. Namun, tujuan utama di sektor politik dan keamanan yang hendak dibangun adalah kuasi-aliansi, yaitu suatu bentuk aliansi tidak resmi yang tetap memberi suatu ekspektasi bagi negara mitra untuk mendapatkan bantuan militer jika terlibat konflik dengan negara lain (Garnaut, 2014).

Kesimpulan

Kemitraan strategis Indonesia dan AS serta Indonesia dan Cina dapat dijadikan instrumen perimbangan kekuatan (eksternal) atas ancaman Malaysia dengan aliansi FPDA-nya. Hal itu disebabkan kemitraan strategis walau bersifat fleksibel dan tidak mengikat. Namun tetap memberi koridor kerjasama yang bersifat khusus antar sesama negara mitra strategis. Kekhususan kerjasama ini yang harus dioptimalkan oleh negara mitra strategis untuk mengamankan kepentingannya, terutama dalam upaya perimbangan kekuatan dengan aliansi kuat lawan.

Strategi diplomasi dengan menggunakan kemitraan strategis ini, penulis menamakan *bargaining* sebagai penyempurnaan Teori Perimbangan Kekuatan yang hanya menawarkan strategi *balancing* dan *bandwagoning*. *Bargaining* akan memiliki nilai strategis jika ditujukan pada negara lemah (*lesser state* atau *temporarily weak state*) Non-Blok dalam menghadapi ancaman aliansi lawan yang lebih kuat. Strategi *bargaining* ini cenderung merupakan bagian dari strategi *balancing* namun tidak menggunakan aliansi atau blok militer sebagai instrumen diplomasinya. Hanya saja, efektivitas *bargaining* akan ditentukan dari sejauh mana kerjasama di bidang politik dan keamanan dengan negara mitranya dapat terbangun menjadi kuasi aliansi (Garnaut, 2014).

Daftar Pustaka

- Benson, B.V., Bentley, P.R., & Ray, J.L. (2013). Ally Provocateur: Why Allies Do Not Always Behave. *Journal of Peace Research*.
- Dwivedi, S.S. (2012). Alliances in International Relations Theory. *International Journal of Social Science & Interdisciplinary Research*. Vol. 1 (8), Hal. 224-237.
- Garnaut, John. (2014). Australia-Japan military ties are a 'quasi-alliance', say officials. *The Sydney Morning Herald*. Diambil 29 Agustus 2015 dari <http://www.smh.com.au/national/australiajapan-military-ties-are-a-quasi-alliance-say-officials-20141026-11c4bi.html>
- Godement, F. (2015). One Belt, One Road: Tiongkok Cina's Great Leap Outward. *Cina Analysis*. European Council for Foreign Relations.
- Harmantyo. D. (2006). *Ambalat Issues: a preliminary study on the problem of Indonesia territorial boundaries*. Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM.
- Haryono, I.D. (2006). *Perspektif Malaysia tentang Sengketa Ambalat (unpublished)*
- Kassim, Y.R. (2005). ASEAN Cohesion: Making Sense of Indonesia Reactions to Bilateral Disputes. Singapura: *IDSS Commentaries* No. 15, NTU.
- Kementerian Pertahanan RI. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*.
- Kuik, C. (2008). The Essence of Hedging: Malaysia and Singapore's Response to a Rising Cina. *Contemporary Southeast Asia* Vol. 30, No. 2 (2008), Hal. 159–185.
- Kuik, C. (2010). *Smaller States' Alignment Choices: A Comparative Study of Malaysia And Singapore's Hedging Behavior In The Face Of A Rising Tiongkok*. Baltimore: Johns Hopkins University (disertasi)
- Kuik, C. (2015). An Emerging 3rd Pillar in Asian Architecture? AIIB and Other TiongkokCina-led Initiatives. *Asia Pacific Bulletin* Number 305. Maret 26, 2015.
- Montratama, I. (2017). *Analisis "Deterrence Perception" Atas Kemampuan Alat Utama Sistem Senjata Malaysia Dihadapkan dengan Indonesia dalam Konteks Pengendalian Blok Laut Ambalat (2010-2014)*. Bandung Jakarta: Tesis Unhan Disertasi Unpad.
- Morgenthau, H. J. (1948). *Politics amongst Nations*. New York: Alfred A. Knoff.
- Morgenthau, H. J., & Thompson, K. (1985). *Politics Among Nations*. New York: McGraw-Hill.
- Muhammad A. S. (2014). *Sengketa Batas Wilayah Indonesia-Malaysia di Perairan Ambalat*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Lampung (skripsi)
- Paul, T.V., Fortman, M., & Wirtz, J.J. (2004). *Balance of Power: Theory and Practice in the 21st Century*. Stanford: Stanford University Press.
- Sheehan, M. (1996). *The Balance of Power: History and Theory*. New York: Routledge.
- Thayer, C. A. (2007). The Five Power Defence Arrangements: The Quiet Achiever. *Security Challenges*. Volume 3 (1)
- Walt, S. (1997). Why Alliances Endure or Collapse. *Survival: Global Politics and Strategy*, 39 (1): 156-179.
- Walt, S. M. (1987). *The Origin of Alliances*. Itacha: Cornell University Press.
- Walt, S. M. (2009). Alliance in a Unipolar World. *World Politics* 61, (1) Princeton: Princeton University: 86-120.
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of International Politics*. Reading: Addison-Wesley Publishing Company.
- Weinstein, F. B. (1976). *Indonesian Foreign Policy and the Dilemma of Dependence*. Ithaca: Cornell University Press.

- Wilkins, T. S. (2013). *Alignment, not Alliance: The Shifting Paradigm of International Security Cooperation*. Sydney: University of Sydney.
- Yani, Y. M., & Montratama, I. (2015). Nilai Strategis Aliansi Indonesia dengan Amerika Serikat dalam Pengamanan Blok Laut Ambalat. *Jurnal Politik LIPI* Vol. 12 (2): 79-80
- Zhongping, F., & Jing, H. (2014). China's Strategic Partnership Diplomacy: Engaging with a Changing World. *ESPO Working Paper*, Vol. 8. Juni 2014